



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

# KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I  
2019

**Penyusun:**

Penanggung Jawab : Zaid Burhan Ibrahim  
Ketua Tim : Iwan Kurniawan  
Koordinator : Tommy Hansen Panjaitan  
Editor : Arriza Adiya  
Anggota : Nanang Heru Setyo Purdianto  
Mahyiddin

**KANWIL DITJEN  
PERBENDAHARAAN  
Provinsi Aceh**

**DAFTAR ISI**

<b>Daftar Isi</b>	<b>i</b>
<b>I. Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional</b>	<b>1</b>
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
Inflasi	2
Indikator Kesejahteraan	3
<b>II. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN</b>	<b>5</b>
Pendapatan Negara	5
Belanja Negara	8
Prognosis Realisasi APBN	11
<b>III. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD</b>	<b>12</b>
Pendapatan Daerah	13
Belanja Daerah	15
Prognosis Realisasi APBD Sampai Akhir Tahun 2018	16
<b>IV. Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD)</b>	<b>17</b>
Pendapatan Konsolidasian	18
Belanja Konsolidasian	19
Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Indikator Ekonomi Regional	20
<b>V. Berita / Isu Fiskal Terpilih</b>	<b>22</b>
Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Tantangan Kapasitas Fiskal Provinsi Aceh	22
Pembangunan RSUD di Aceh melalui skema KPBU sebagai Alternatif Keterbatasan Fiskal	24

## I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

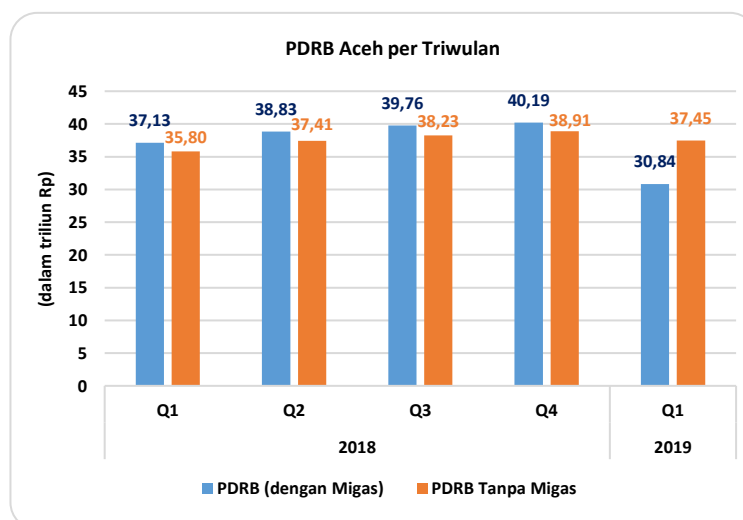
Pada Triwulan I 2019, Pertumbuhan Ekonomi Aceh mencapai 3,88 persen (y-on-y), persentase penduduk miskin 15,68 persen (per September 2018), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,53 persen (per Februari 2019), IPM sebesar 71,19 (2018), Ketimpangan/Gini Ratio sebesar 0,33 (per 2017), dan inflasi sebesar 1,82 persen (y-on-y per Maret 2018). Hampir semua indikator pembangunan masih belum sesuai target, kecuali inflasi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya. Sedangkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh juga masih cukup tinggi. Program-program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan diindikasikan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan ada usaha lebih dari pemerintah untuk lebih concern dalam pelaksanaan program-program tersebut.

### Perbandingan Target dalam KUA Provinsi Aceh dengan Capaian s.d Triwulan I 2019

Indikator Ekonomi Makro	Target KUA Aceh 2019	Aceh Q1 2019	Nasional Q1 2019
Pertumbuhan Ekonomi	5,00%	3,88%	5,07%
Kemiskinan	15,43%	15,68%	9,66%
Pengangguran	6,85%	5,53%	5,01%
IPM	70,92	71,19	71,39
Gini Ratio	0,32	0,32	0,38
Inflasi	4%	1,82%	2,48%

Sumber: Bappeda dan BPS Aceh, 2019 (diolah)

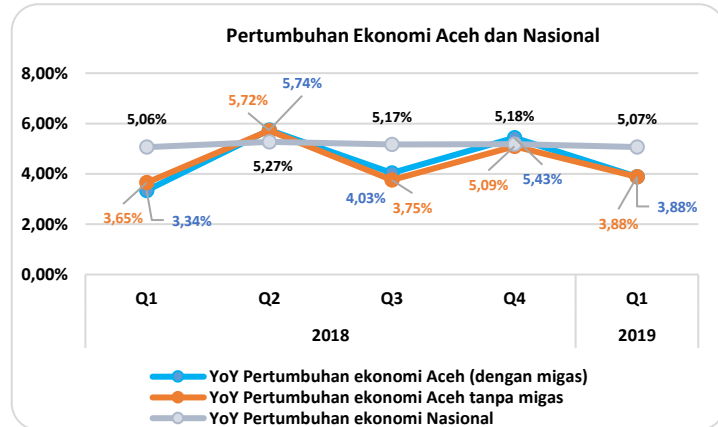
### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

PDRB Aceh (Atas Dasar Harga Berlaku) pada triwulan I 2019 sebesar Rp30,84 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding triwulan IV 2018 yang sebesar Rp40,19 triliun, dan periode yang sama tahun lalu (triwulan I 2018) yang sebesar Rp37,13 triliun. Jika komponen migas dikeluarkan, PDRB Aceh pada triwulan I 2019 menjadi sebesar Rp37,45 triliun. Angka tersebut juga mengalami penurunan secara q-to-q, namun secara y-on-y mengalami kenaikan dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada Grafik disamping tercatat bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2019 berada pada level 3,88 persen, turun 155 basis poin dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,43 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pada periode

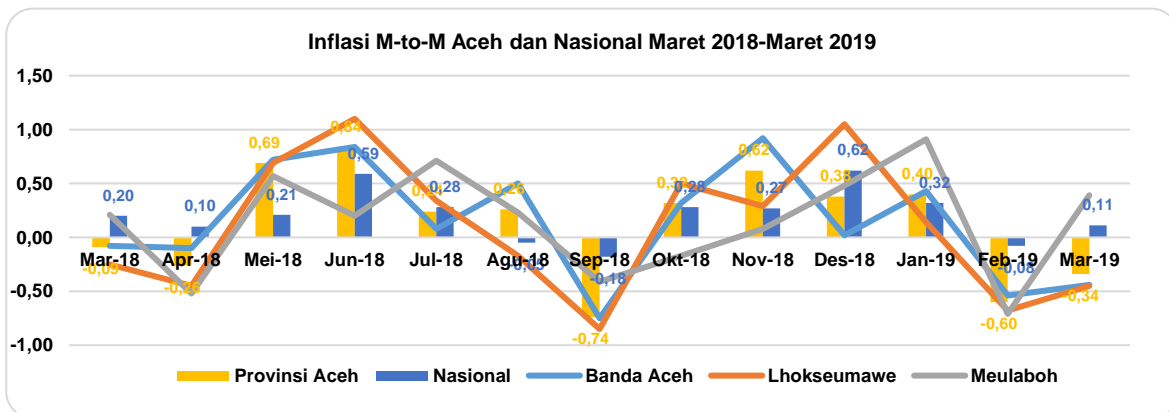


Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

yang sama tahun sebelumnya yang berada pada level 3,34 persen. Angka tersebut juga masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada triwulan I 2019 berada pada level 5,07 persen. Apabila komponen migas dihilangkan, pertumbuhan PDRB Aceh berada pada level 3,88 persen, turun 121 basis poin dibanding triwulan IV 2018.

**B. Inflasi**

Secara m-to-m, pada tiga bulan terakhir tercatat inflasi Aceh cukup rendah, yang bahkan mengalami deflasi pada bulan Maret sebesar -0,34 persen. Penurunan IHK Aceh tersebut bahkan lebih besar dibanding nasional yang pada bulan yang sama tercatat mengalami inflasi sebesar 0,11 persen.



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

**Kontribusi Kelompok Pengeluaran pada Inflasi Aceh**

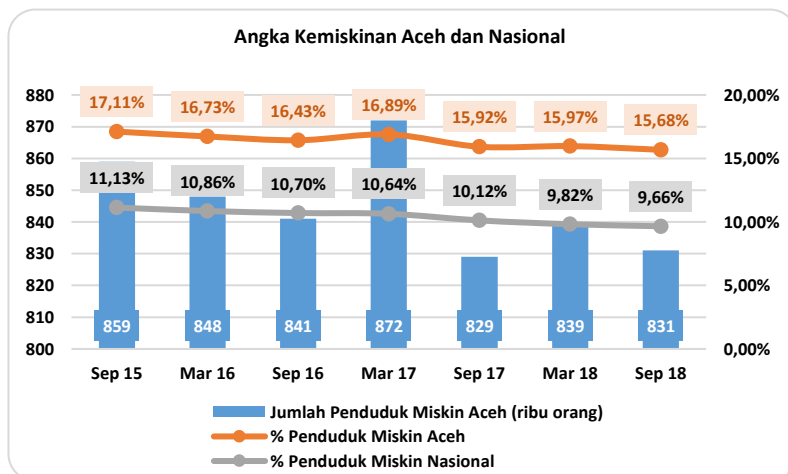
Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2018	IHK Maret 2019	Inflasi YoY
Bahan Makanan	136,30	135,50	-0,58%
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	126,22	130,78	3,25%
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	122,77	124,45	1,37%
Sandang	127,11	130,23	2,45%
Kesehatan	116,52	119,21	2,30%
Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	120,19	123,10	2,43%
Transportasi, Komunikasi & Jasa Keuangan	123,40	128,82	4,39%

Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

Secara bulanan, pada bulan September Kelompok Bahan Makanan memiliki andil terbesar dalam deflasi Aceh, terutama untuk Subkelompok Daging dan Subkelompok Sayur-sayuran. Secara year-on-year, Aceh mengalami

inflasi sebesar 1,82 persen per Maret 2019, lebih rendah dari pada inflasi tahunan nasional yang sebesar 2,48 persen per Maret 2019. Dari seluruh kelompok yang mempengaruhi inflasi, Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan mengalami kenaikan IHK tertinggi yaitu sebesar 4,39 persen, diikuti kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau yang sebesar 2,90 persen dari IHK bulan Maret tahun sebelumnya.

### C. Indikator Kesejahteraan

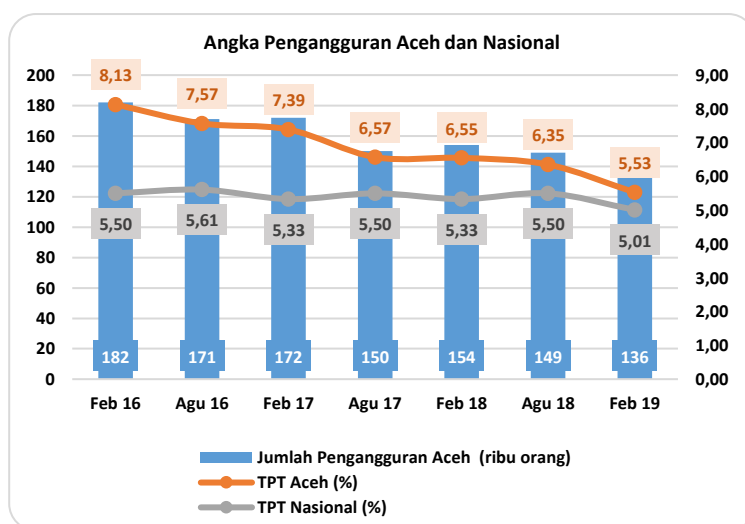


Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

Persentase penduduk miskin Aceh selama periode September 2015 sampai dengan September 2018 terus berfluktuasi. Sempat mengalami kenaikan pada periode Maret 2018 di level 15,97 persen dibanding periode September 2017 yang

sebesar 15,92 persen, persentase penduduk miskin Aceh turun di periode September 2018 di level 15,68 persen. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional, yang bahkan selalu terjadi dalam beberapa periode terakhir.

Dari sisi angka pengangguran tercatat per Februari 2019 sebanyak 136 ribu orang, menurun jika dibandingkan jumlah pengangguran pada periode Agustus 2018 yang sebanyak 149 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2019 sebesar 5,53 persen,

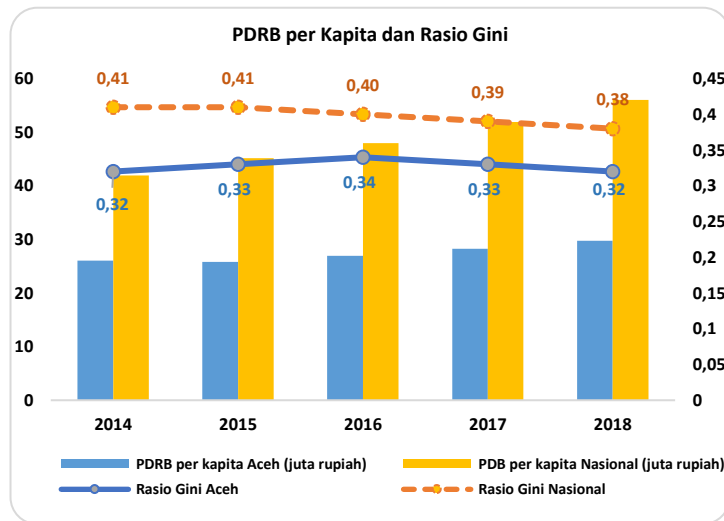


Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode Agustus 2018 yang mencapai 6,35 persen. Tren TPT Aceh terus mengalami penurunan secara berkelanjutan dari sejak

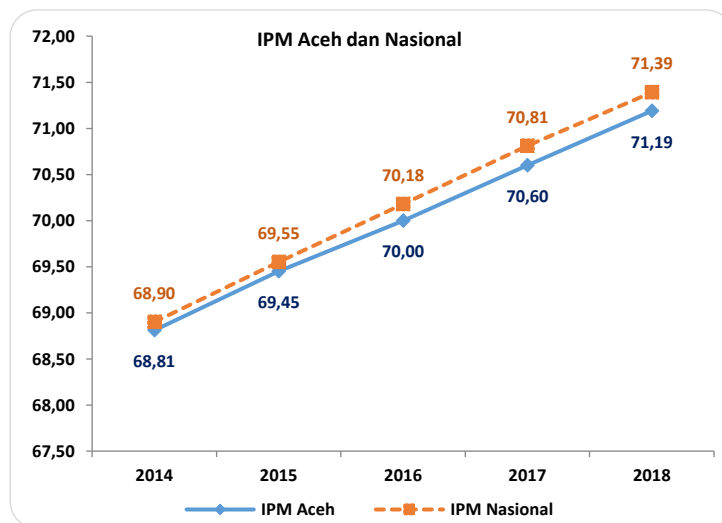
periode Februari 2016. Meskipun demikian, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, angka TPT Aceh masih selalu tinggi jika dibandingkan TPT secara nasional.

Dari sisi ketimpangan, data BPS menunjukkan bahwa posisi Rasio Gini Aceh per 2018 berada pada level 0,32, artinya menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,33. Angka tersebut juga terhitung lebih rendah jika dibandingkan dengan Rasio Gini nasional yang sebesar 0,38. Namun demikian, meskipun



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

secara pemerataan pendapatan selalu lebih rendah, secara bersamaan PDRB per Kapita Aceh juga selalu lebih rendah dibanding PDRB per kapita secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat Aceh mengalami rata ke bawah, yang mana hal ini juga terlihat dari angka kemiskinan Aceh yang masih tinggi.



Sumber: BPS Aceh dan Nasional, 2019 (diolah)

Dari sisi pembangunan manusia, data BPS terakhir menunjukkan bahwa IPM Aceh sampai dengan tahun 2018 berada pada level 71,19. Artinya IPM Aceh masih termasuk dalam kategori IPM Tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ). Meskipun angka tersebut masih tipis dibawah IPM Nasional (71,39), namun tren kenaikan IPM Aceh

terhitung sangat stabil dari tahun ke tahun. Diharapkan tren positif ini bisa terus berlanjut, ditengah pemerintah Aceh yang terus fokus dalam peningkatan dunia pendidikan di Aceh, baik dalam hal peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi di Aceh, serta pemberian beasiswa untuk putra-putri Aceh baik dalam maupun luar negeri.

## II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

### LRA APBN Lingkup Provinsi Aceh (dalam miliar rupiah)

Uraian	2018			2019		
	Pagu	Realisasi Q1	%	Pagu	Realisasi Q1	%
<b>A. Pendapatan</b>	<b>5.975,79</b>	<b>826,40</b>	<b>13,83%</b>	<b>5.833,91</b>	<b>890,19</b>	<b>15,26%</b>
Pajak	5.315,00	639,15	12,03%	5.261,06	687,80	13,07%
PNBP	660,79	187,25	28,34%	572,85	202,39	35,33%
<b>B. Belanja</b>	<b>49.486,82</b>	<b>7.872,45</b>	<b>15,91%</b>	<b>50.029,13</b>	<b>8.745,72</b>	<b>17,48%</b>
<b>Belanja Pusat</b>	<b>14.590,73</b>	<b>1.853,76</b>	<b>12,71%</b>	<b>13.704,34</b>	<b>2.206,18</b>	<b>16,10%</b>
Belanja Pegawai	6.057,26	1.066,97	17,61%	5.773,97	1.190,44	20,62%
Belanja Barang	5.338,45	503,53	9,43%	5.095,95	721,87	14,17%
Belanja Modal	3.169,01	282,26	8,91%	2.792,36	293,10	10,50%
Belanja Bantuan Sosial	26,01	1,00	3,84%	42,06	0,77	1,84%
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>34.896,10</b>	<b>6.018,70</b>	<b>17,25%</b>	<b>36.324,79</b>	<b>6.539,54</b>	<b>18,00%</b>
Dana Bagi Hasil	1.328,58	242,58	18,26%	1.410,02	247,62	17,56%
Dana Alokasi Umum	14.728,92	4.796,34	32,56%	15.242,09	5.080,70	33,33%
Dana Alokasi Khusus	5.927,90	277,47	4,68%	6.228,65	258,41	4,15%
Dana Otsus dan DID	8.451,29	91,38	1,08%	8.488,54	60,52	0,71%
Dana Desa	4.459,41	610,94	13,70%	4.955,50	892,30	18,01%
<b>C. Surplus/Defisit APBN</b>	<b>-44.171,82</b>	<b>-7.046,06</b>	<b>15,95%</b>	<b>-44.768,07</b>	<b>-7.855,53</b>	<b>17,55%</b>

Sumber: Monev PA, OM SPAN, Simtrada DJPK, 2019 (diolah)

Proporsi realisasi pendapatan APBN sampai dengan triwulan I 2019 yaitu pendapatan pajak sebesar 77,26 persen dan PNBP sebesar 22,74 persen. Sampai dengan triwulan I 2019, realisasi pendapatan APBN sebesar Rp890,19 miliar (15,26 persen). Realisasi pendapatan APBN tercatat mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp826,40 miliar (13,83 persen).

Proporsi realisasi belanja APBN sampai dengan triwulan I 2019 yaitu sebesar 25,23 persen merupakan belanja pusat, dan 74,77 persen merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Realisasi belanja APBN sampai dengan triwulan I 2019 sebesar Rp8,74 triliun (17,48 persen) meningkat baik secara nominal maupun secara persentase dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp7,87 triliun (15,91 persen).

### A. Pendapatan Negara

#### 1. Pendapatan Pajak

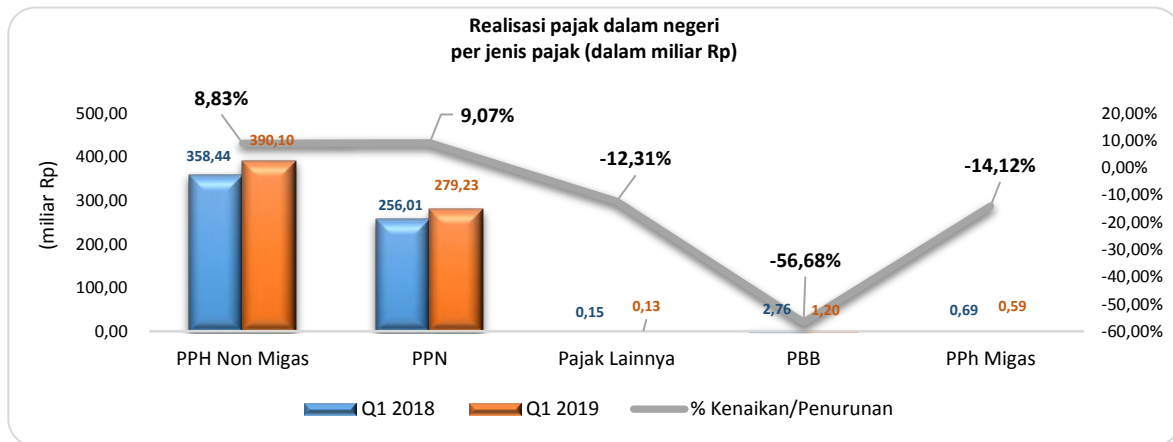
##### a. Pajak Dalam Negeri

Total realisasi penerimaan pajak dalam negeri di Aceh sampai dengan triwulan I 2019 sebesar Rp671,25 miliar. Berdasarkan jenis pajak, proporsi terbesar dari total



Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

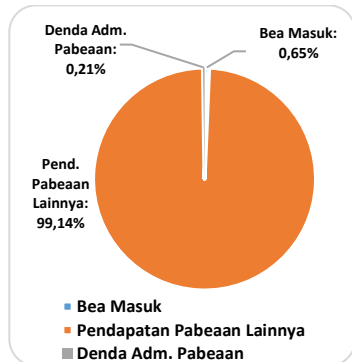
realisasi pajak dalam negeri di Aceh yaitu berasal dari PPh Non Migas yaitu sebesar 54,12 persen, diikuti PPN sebesar 41,60 persen.



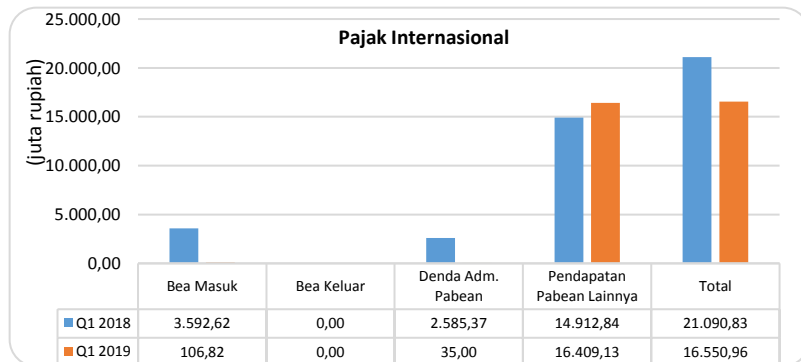
Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

Secara *y-on-y*, PPh Non Migas sebagai kontributor terbesar pajak dalam negeri mengalami kenaikan sebesar 8,83 persen dan PPN meningkat sebesar 9,07 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun mengalami kenaikan dari total penerimaan pajak Q1, tetapi jenis pajak PBB, PPh Migas dan Pajak Lainnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menjadi rambu-rambu dalam pencapaian target penerimaan pajak di tahun 2019.

**b. Pajak Perdagangan Internasional**



Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)



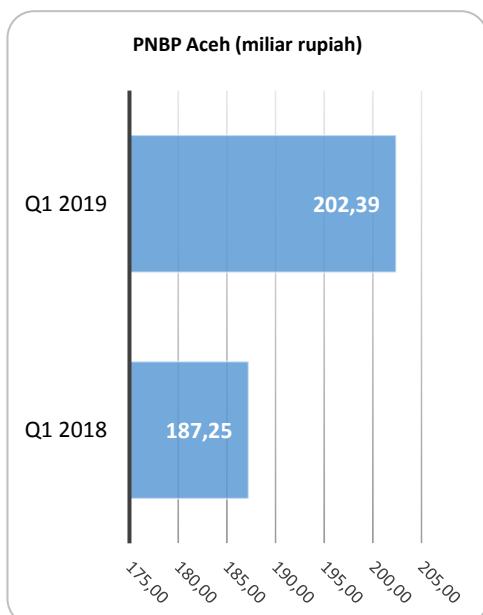
Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

Komposisi Pajak Perdagangan Internasional di Aceh sampai dengan triwulan I 2019 terdiri dari 3 jenis pajak, yaitu Bea Masuk (dengan proporsi 0,65 persen), Denda Administrasi Pabeaan (dengan proporsi 0,21 persen) dan Pendapatan Pabeaan Lainnya (dengan proporsi 99,14 persen).

Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, total realisasi pajak internasional di Aceh mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan tersebut berasal dari semua jenis pajak perdagangan internasional, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan aktivitas ekspor-impor yang terjadi di Aceh selama periode tahun 2019.



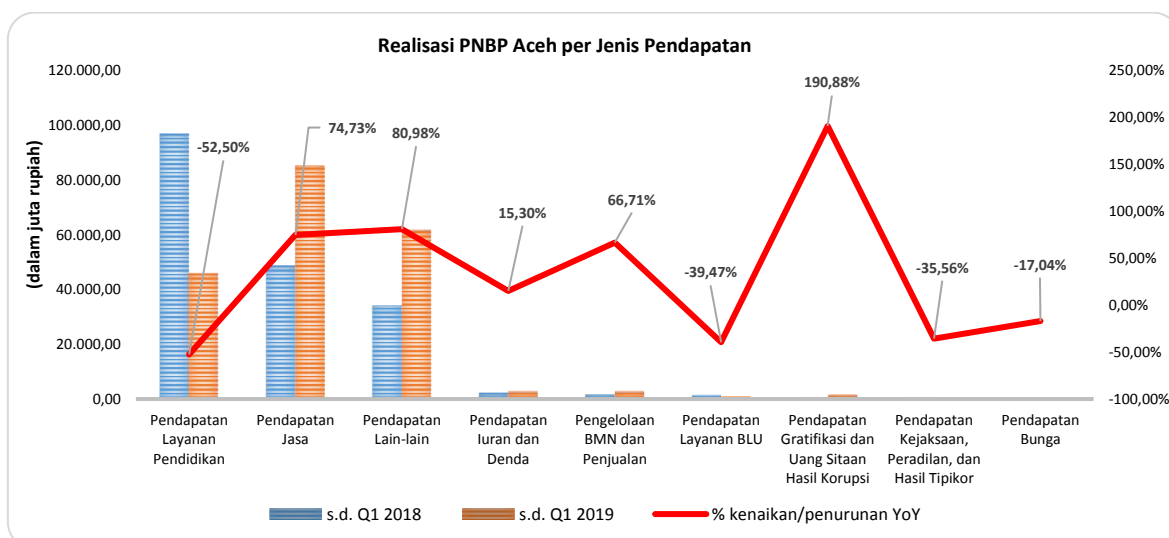
## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

PNBP di Aceh menyumbang kontribusi sebesar 22,74 persen dari total pendapatan APBN di Aceh sampai dengan triwulan I 2019. Tercatat posisi terakhir realisasi PNBP Aceh sampai dengan triwulan I 2019 yaitu sebesar Rp202,39 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp187,25 miliar.

Pendapatan Layanan Pendidikan menjadi jenis PNBP dengan kontribusi terbesar, diikuti Pendapatan Jasa sebagai terbesar kedua. Sementara Pendapatan Bunga menjadi kontributor terkecil dari total realisasi PNBP di Aceh.

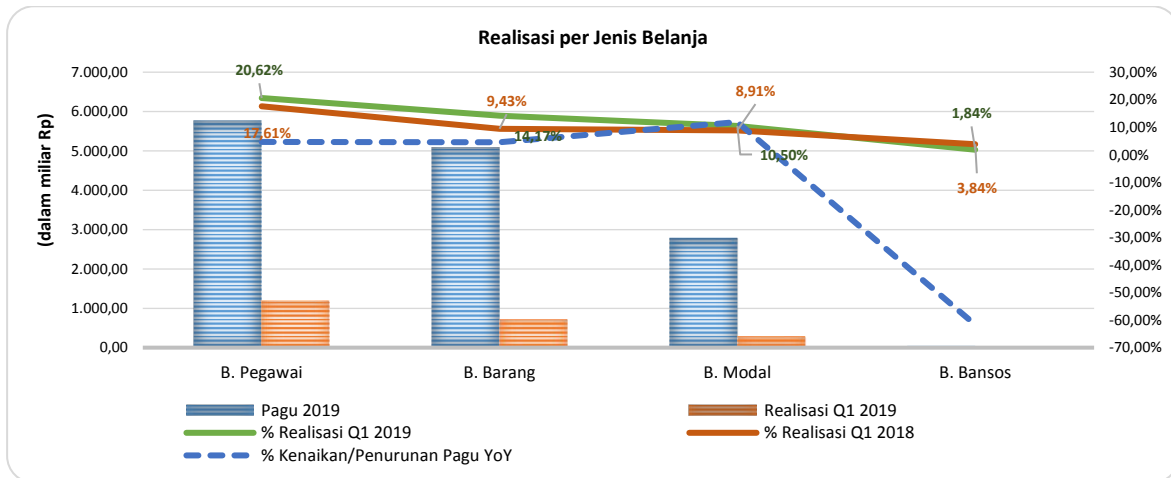


Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

Pendapatan Jasa sebagai kontributor terbesar dalam realisasi PNBP Aceh, mengalami kenaikan sebesar 74,73 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi pada Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang mengalami kenaikan sebesar 190,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Layanan Pendidikan yang mengalami penurunan sebesar 62,50 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

## B. Belanja Negara

### 1. Belanja Pusat



Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

Belanja Pegawai masih menjadi jenis belanja dengan proporsi terbesar dalam struktur Belanja Pusat di Aceh yaitu sebesar 42,13 persen dari total pagu belanja pusat. Pada Tahun 2019, semua jenis belanja pusat mengalami penurunan pagu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, realisasi belanja pusat mengalami peningkatan baik secara nominal maupun secara persentase.

#### Perkembangan Belanja Pusat per Fungsi

Fungsi	Pagu 2018	Realisasi Q1 2018	% Realisasi 2018	Pagu 2019	Realisasi Q1 2019	% Realisasi 2019	% Kenaikan / Penurunan Pagu	% Kenaikan / Penurunan Realisasi
Pelayanan Umum	8.632,41	733,17	8,49%	9.148,38	1.143,35	12,50%	5,98%	55,95%
Pertahanan	1.786,08	329,44	18,45%	1.859,39	433,78	23,33%	4,10%	31,67%
Ketertiban dan Keamanan	2.260,64	417,40	18,46%	2.246,63	500,19	22,26%	-0,62%	19,83%
Ekonomi	3.449,14	342,22	9,92%	2.934,48	331,49	11,30%	-14,92%	-3,13%
Lingkungan Hidup	211,46	15,64	7,40%	388,37	23,92	6,16%	83,66%	52,95%
Perumahan dan Fasilitas Umum	750,32	44,93	5,99%	358,49	28,37	7,91%	-52,22%	-36,85%
Kesehatan	347,61	33,24	9,56%	279,30	41,80	14,96%	-19,65%	25,75%
Pariwisata dan Budaya	2,70	0,03	1,09%	1,90	0,03	1,51%	-29,59%	-2,50%
Agama	333,08	54,70	16,42%	337,30	69,25	20,53%	1,27%	26,61%
Pendidikan	3.949,10	493,16	12,49%	3.825,30	525,49	13,74%	-3,14%	6,55%
Perlindungan Sosial	28,40	0,77	2,71%	28,78	0,81	2,80%	1,31%	4,80%
<b>Jumlah</b>	<b>21.750,94</b>	<b>2.464,70</b>	<b>11,33%</b>	<b>21.408,32</b>	<b>3.098,47</b>	<b>14,47%</b>	<b>-1,58%</b>	<b>25,71%</b>

Sumber: Monev PA, 2019 (diolah)

Berdasarkan Fungsi Belanja, terlihat bahwa dalam dua tahun terakhir prioritas pembangunan pemerintah pusat di Provinsi Aceh adalah Fungsi Pelayanan Umum, diikuti Fungsi Pendidikan sebagai prioritas berikutnya. Tingginya porsi Belanja Fungsi Pelayanan Umum dan Pendidikan di Aceh menandakan bahwa pemerintah pusat mengarahkan kebijakan fiskal untuk membangun pelayanan umum dan kualitas sumber daya manusia di Aceh. Dampaknya tercermin dari peningkatan angka IPM Aceh dan

pertumbuhan ekonomi secara stabil dalam beberapa tahun terakhir, yang mana unsur pendidikan menjadi salah satu indikatornya

Tahun 2019 Fungsi Lingkungan Hidup mengalami kenaikan pagu yang paling signifikan yaitu sebesar 83,66 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan penurunan pagu paling signifikan dialami Perumahan dan Fasilitas Umum yaitu sebesar 52,22 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa membangun Sektor Lingkungan Hidup menjadi salah satu arah kebijakan fiskal pemerintah pusat melalui skema APBN dalam rangka membangun perekonomian Aceh.

## 2. Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

### Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

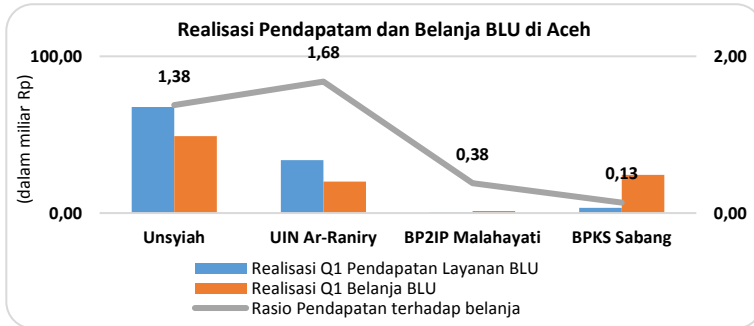
Jenis Transfer	Pagu 2018 (miliar Rp)	Realisasi Q1 2018 (miliar Rp)	% Realisasi Q1 2018	Pagu 2019 (miliar Rp)	Realisasi Q1 2019 (miliar Rp)	% Realisasi Q1 2019	% Kenaikan/ Penurunan Pagu	% Kenaikan/ Penurunan Realisasi
DBH	1.328,58	242,58	18,26%	1.410,02	247,62	17,56%	6,13%	2,08%
DAU	14.728,92	4.796,34	32,56%	15.242,09	5.080,70	33,33%	3,48%	5,93%
DAK	5.927,90	277,47	4,68%	6.228,65	258,41	4,15%	5,07%	-6,87%
DAK Fisik	2.700,80	0,00	0,00%	2.742,87	0,00	0,00%	1,56%	0,00%
DAK Nonfisik	3.227,09	277,47	8,60%	3.485,78	258,41	7,41%	8,02%	-6,87%
Otsus dan DID	8.451,29	91,38	1,08%	8.488,54	60,52	0,71%	0,44%	-33,77%
Dana Desa	4.459,41	610,94	13,70%	4.955,50	892,30	18,01%	11,12%	46,05%
<b>TOTAL</b>	<b>34.896,10</b>	<b>6.018,70</b>	<b>17,25%</b>	<b>36.324,79</b>	<b>6.539,54</b>	<b>18,00%</b>	<b>4,09%</b>	<b>8,65%</b>

Sumber: Simtrada, 2019 (diolah)

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4,09 persen dari tahun sebelumnya. Jika diuraikan per jenis transfer, Dana Desa mengalami peningkatan pagu paling signifikan yaitu sebesar 11,12 persen dibandingkan tahun 2018. Dari sisi realisasi sampai dengan triwulan I 2019, peningkatan paling signifikan terjadi pada Dana Desa yang meningkat sebesar 46,05 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi penyaluran Otsus dan DID turun sebesar 33,77 persen dibanding tahun sebelumnya.

## 3. Pengelolaan BLU

Per bulan Juli 2018, Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh telah resmi berstatus BLU. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini di Provinsi Aceh telah terdapat empat satker BLU. Tiga satker sebelumnya yaitu BPKS Sabang, UIN Ar-Raniry dan BP2IP Malahayati telah terlebih dahulu berstatus BLU.



Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

terhadap total belanja yang direalisasikan di tahun yang bersangkutan. Grafik diatas menunjukkan bahwa diantara 4 satker BLU Pusat di Aceh, sampai dengan triwulan I 2019, pendapatan layanann Unsyiah dan UIN Ar-Raniry telah melebihi realisasi belanja. Hal ini menunjukkan kedua BLU tersebut tidak ketergantungan terhadap alokasi dana APBN, sedangkan BPKS Sabang dan BP2IP Malahayati menunjukkan ketergantungan terhadap alokasi dana APBN yang masih tinggi dalam memenuhi kebutuhan belanjanya.

#### 4. Manajemen Investasi Pusat

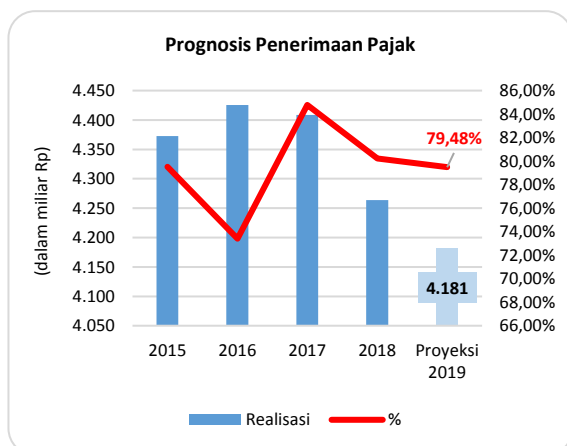
##### Penyaluran KUR di Prov. Aceh per Sektor Ekonomi s.d. Triwulan I 2019

Sektor Ekonomi	Penyaluran (Rp)	Akad Outstanding (Rp)	Debitur (orang)	Rata-rata Kredit per Debitur (Rp)
Industri Pengolahan	25.611.000.000	9.188.938.957	942	27.187.898,09
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya	35.884.915.400	12.816.800.462	1.529	23.469.532,64
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial	3.073.000.000	1.687.881.466	49	62.714.285,71
Jasa Pendidikan	183.000.000	62.083.314	8	22.875.000,00
Konstruksi	1.185.000.000	640.920.887	5	237.000.000,00
Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum	11.352.200.000	4.776.418.866	273	41.583.150,18
Perdagangan Besar Dan Eceran	265.383.000.000	100.126.870.086	8.584	30.916.006,52
Perikanan	8.537.000.000	2.069.956.115	316	27.015.822,78
Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan	103.950.000.000	33.333.784.582	4.717	22.037.311,85
Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan	6.528.000.000	3.678.913.902	68	96.000.000,00
Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi	6.535.000.000	2.212.696.430	298	21.929.530,20
<b>TOTAL</b>	<b>468.222.115.400</b>	<b>170.595.265.067</b>	<b>16.789</b>	<b>27.888.624,42</b>

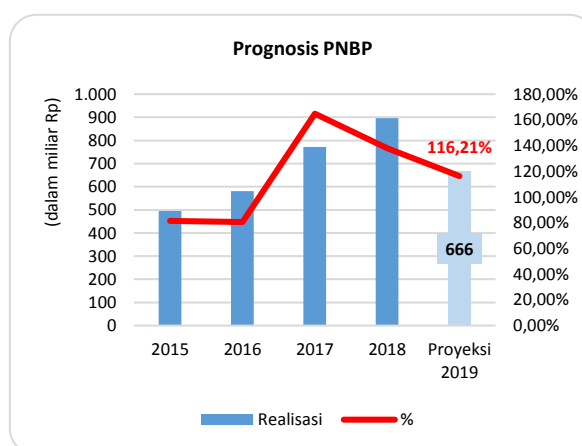
Sumber: SIKP, 2019 (diolah)

Nilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Aceh hingga triwulan I 2019 mencapai Rp468,22 miliar, dengan jumlah debitur sebanyak 16.789 debitur. Dari jumlah tersebut terlihat bahwa rata-rata per debitur memiliki kredit sebesar Rp27,88 juta. Dari 10 kategori jenis usaha debitur KUR di Aceh, penyaluran untuk Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi yang terbesar yaitu sebesar 56,68 persen dari total KUR yang tersalur. Terbesar kedua yaitu Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 22,20 persen dari total KUR yang tersalur. Sedangkan sektor dengan jumlah kredit terkecil berasal dari Jasa Pendidikan yang hanya sebesar Rp183 juta atau sebesar 0,04 persen dari total KUR yang tersalur di Aceh.

### C. Prognosis Realisasi APBN s.d Akhir Tahun 2019

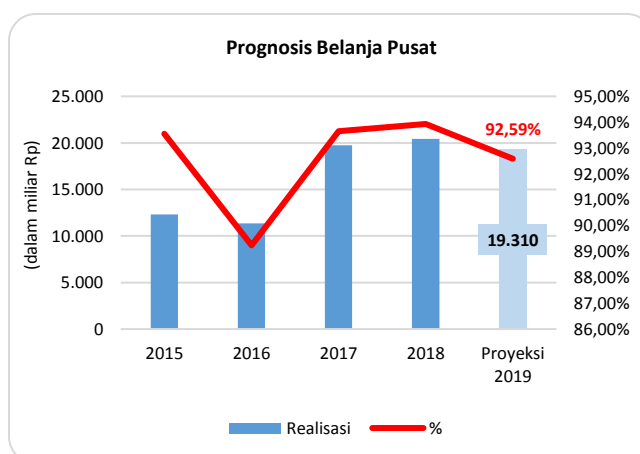


Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)



Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

Prognosis realisasi Pendapatan Pajak, PNBPN dan Belanja dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi dalam 4 tahun terakhir. Realisasi Pendapatan Pajak pada akhir tahun 2019 diproyeksikan akan terealisasi kurang lebih 79,48 persen, dengan nominal realisasi sebesar ± Rp4,18 triliun. Realisasi PNBPN pada akhir tahun 2019 diproyeksikan akan terealisasi kurang lebih 116,21 persen, dengan nominal realisasi sebesar ± Rp666 miliar. Realisasi Belanja pada akhir tahun 2019 diproyeksikan akan terealisasi kurang lebih 92,59 persen, dengan nominal realisasi sebesar ± Rp19,31 triliun.



Sumber: Monev PA, 2019 (diolah)

#### Prognosis TKDD 2019

Jenis Transfer	% Realisasi 2015	% Realisasi 2016	% Realisasi 2017	% Realisasi 2018	Rata-rata Realisasi 2015-2018	Pagu 2019 (miliar Rp)	Proyeksi Akhir Tahun 2019 (miliar Rp)
DBH	79,50%	80,47%	58,31%	84,34%	75,66%	1.410,02	1.066,75
DAK	98,43%	80,66%	92,47%	94,11%	91,42%	15.242,09	13.933,93
Dana Desa	100,00%	99,81%	99,88%	99,94%	99,91%	6.228,65	6.222,89
DAU	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8.488,54	8.488,54
Otsus & DID	100,00%	100,00%	100,00%	99,79%	99,95%	4.955,50	4.952,90

Sumber: Simtrada DJPK dan OM SPAN, 2019 (diolah)

Untuk Prognosis TKDD dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi dalam 3 tahun terakhir, dimana DAU serta Dana Otsus dan DID diproyeksikan akan terealisasi diatas 99 persen sampai dengan akhir tahun 2019, sedangkan DAK dan DBH diproyeksikan akan terealisasi masing-masing sebesar 91,42 persen dan 75,66 persen.

## Prognosis Realisasi APBN lingkup Provinsi Aceh Tahun 2019

Uraian	% Realisasi 2015	% Realisasi 2016	% Realisasi 2017	% Realisasi 2018	Prognosis % Realisasi 2019	Pagu 2019 (miliar Rp)	Proyeksi Akhir Tahun 2019 (miliar Rp)
<b>Pendapatan Negara</b>							<b>4.847,09</b>
Penerimaan Pajak	79,51%	73,40%	84,78%	80,22%	79,48%	5.261,06	4.181,36
PNBP	81,39%	80,56%	164,83%	138,07%	116,21%	572,85	665,72
<b>Belanja Negara</b>	93,55%	89,24%	93,65%	93,93%	92,59%	50.029,13	<b>46.322,70</b>
<b>Surplus/Defisit</b>							<b>-41.475,62</b>

Sumber: Monev PA, Simtrada DJPK dan OM SPAN, 2019 (diolah)

Pendapatan APBN diproyeksikan mengalami penurunan, baik pada Penerimaan Pajak maupun PNBP. Dari sisi pengeluaran, belanja negara diperkirakan mengalami penurunan sebesar 1,34 persen. Penurunan lebih dikarenakan penurunan pada realisasi Jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal secara nominal, yang mana merupakan dampak dari menurunnya pagu pada jenis belanja tersebut dibandingkan tahun sebelumnya.

## III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

## Pagu dan Realisasi APBD (APBA+APBK) Lingkup Provinsi Aceh s.d Triwulan I 2019

Uraian	2018			2019		
	Pagu	Realisasi Q1	%	Pagu	Realisasi Q1	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>52.604,64</b>	<b>6.635,83</b>	<b>12,61%</b>	<b>58.856,20</b>	<b>7.042,60</b>	<b>11,97%</b>
<b>PAD</b>	<b>5.998,05</b>	<b>594,48</b>	<b>9,91%</b>	<b>5.498,55</b>	<b>484,95</b>	<b>8,82%</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>34.886,00</b>	<b>6.024,97</b>	<b>17,27%</b>	<b>36.324,79</b>	<b>6.539,54</b>	<b>18,00%</b>
DBH	1.328,58	242,58	18,26%	1.410,02	247,62	17,56%
DAU	14.728,92	4.796,34	32,56%	15.242,09	5.080,70	33,33%
DAK	5.919,70	283,73	4,79%	6.228,65	258,41	4,15%
Dana Otsus dan DID	8.451,29	91,38	1,08%	8.488,54	60,52	0,71%
Dana Desa	4.457,51	610,94	13,71%	4.955,50	892,30	18,01%
<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>11.720,59</b>	<b>16,38</b>	<b>0,14%</b>	<b>17.032,86</b>	<b>18,12</b>	<b>0,11%</b>
<b>BELANJA</b>	<b>43.086,45</b>	<b>3.123,95</b>	<b>7,25%</b>	<b>47.782,83</b>	<b>2.969,99</b>	<b>6,22%</b>
<b>Belanja Daerah</b>	<b>36.529,74</b>	<b>2.761,17</b>	<b>7,56%</b>	<b>38.017,87</b>	<b>2.814,94</b>	<b>7,40%</b>
Belanja Pegawai	13.946,81	1.979,94	14,20%	14.953,78	2.050,00	13,71%
Belanja Barang dan Jasa	12.608,31	401,27	3,18%	12.555,87	439,33	3,50%
Belanja Modal	7.675,58	132,00	1,72%	9.162,64	145,32	1,59%
Belanja Bantuan Sosial	756,60	27,35	3,61%	219,42	2,88	1,31%
Belanja Tak Terduga	144,32	17,61	12,20%	210,37	24,83	11,80%
Belanja Lainnya	1.398,12	203,00	14,52%	915,80	152,58	16,66%
<b>Transfer</b>	<b>6.556,71</b>	<b>362,78</b>	<b>5,53%</b>	<b>9.764,96</b>	<b>155,06</b>	<b>1,59%</b>
Belanja Bagi Hasil	1.053,17	0,00	0,00%	737,40	43,95	5,96%
Belanja Bantuan Keuangan	5.503,54	362,78	6,59%	9.027,56	111,11	1,23%
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>9.518,19</b>	<b>3.511,88</b>	<b>36,90%</b>	<b>11.073,37</b>	<b>4.072,61</b>	<b>36,78%</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>1.998,48</b>	<b>548,99</b>	<b>27,47%</b>	<b>2.300,22</b>	<b>397,65</b>	<b>17,29%</b>
Penerimaan Pembiayaan	2.100,43	550,79	26,22%	2.408,09	403,07	16,74%
Pengeluaran Pembiayaan	101,95	1,80	1,77%	107,87	5,43	5,03%
<b>SILPA</b>	<b>11.516,67</b>	<b>4.060,87</b>	<b>35,26%</b>	<b>13.373,59</b>	<b>4.470,26</b>	<b>33,43%</b>

Sumber: Simtrada DJPK, BPKA dan Badan Pengelolaan Keuangan seluruh Kab/Kota, 2019 (diolah)

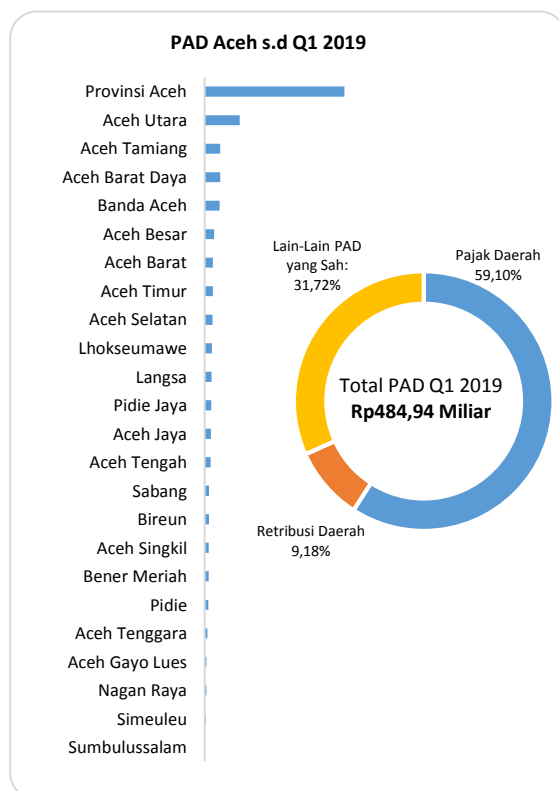
Proporsi terbesar dari realisasi Pendapatan APBD di Aceh yaitu berasal dari Pendapatan Transfer yaitu sebesar 92,86 persen dari total realisasi Pendapatan. PAD hanya memiliki porsi sebesar 6,89 persen dari total pendapatan, dan sisanya dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,26 persen. Artinya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Secara total, terjadi penurunan realisasi Pendapatan APBD jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara total, realisasi Belanja APBD juga mengalami penurunan, baik dari sisi nominal maupun persentase dari pagu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

## A. Pendapatan Daerah

### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ketergantungan Pemerintah Daerah di Aceh terhadap transfer dari pemerintah pusat tergambar dari kecilnya proporsi PAD dalam struktur APBD di Aceh. Data sampai dengan triwulan I 2019 menunjukkan bahwa total realisasi PAD dari seluruh pemda di Aceh yaitu sebesar Rp484,94 miliar, hanya 6,89 persen dari total pendapatan daerah.

Dari total realisasi PAD, porsi terbesar berasal dari Pajak Daerah (59,10 persen), diikuti Lain-lain PAD yang Sah (31,72 persen), dan Retribusi Daerah (9,18 persen). Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan triwulan I 2019 belum ada realisasi pendapatan.



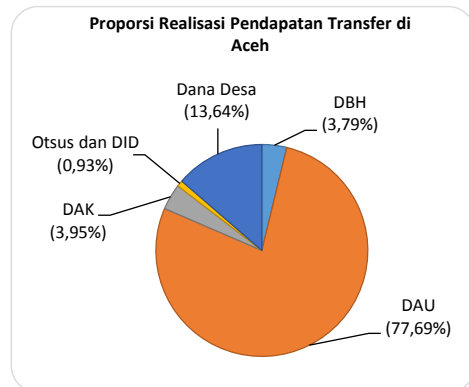
Sumber: BPKA, 2019 (diolah)

Jika dilihat dari realisasi per pemda, realisasi PAD hingga triwulan I 2019 didominasi oleh penerimaan dari Pemda Provinsi Aceh dengan total realisasi sebesar Rp214,43 miliar, atau secara persentase sebesar 44,22 persen dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Jauh lebih tinggi dari daerah dengan realisasi PAD terbesar kedua yaitu Kab. Aceh Utara yang sebesar Rp54,05 miliar atau secara persentase sebesar 11,15 persen dari total realisasi PAD di seluruh Aceh. Hal ini disebabkan sumber penerimaan pajak daerah yang termasuk dalam kategori pajak provinsi lebih besar jika dibandingkan dengan pajak kabupaten/kota.

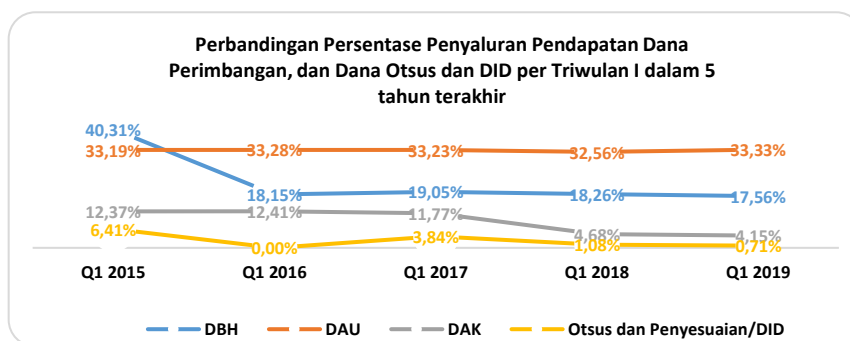


## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dan Dana Desa dari Pemerintah Pusat merupakan jenis pendapatan dengan *share* terbesar dari total realisasi pendapatan APBD di lingkup Provinsi Aceh, dengan persentase sebesar 61,72 persen. Persentase penyaluran pendapatan transfer dari RKUN ke RKUD sampai dengan triwulan I 2019 tercatat sebesar 18,00 persen dari pagu tahun 2019.



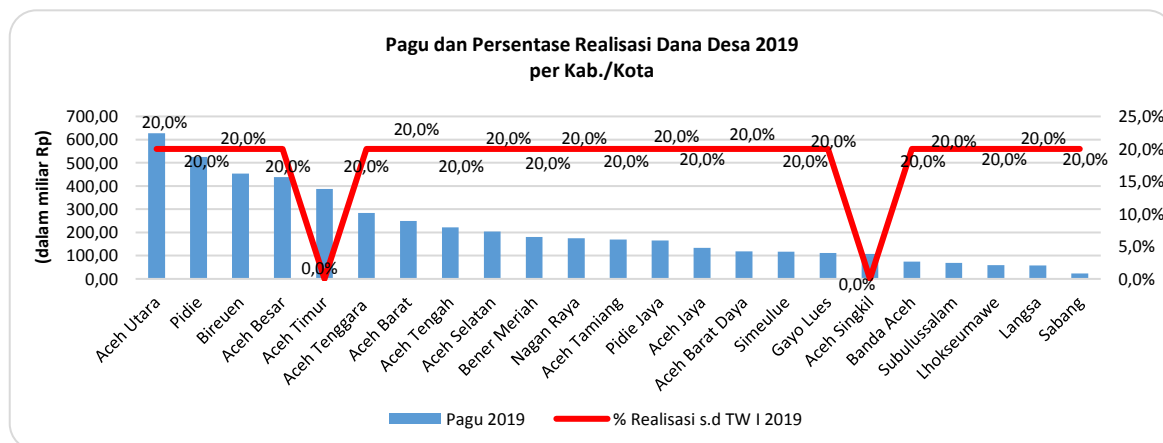
Sumber: Simtrada DJPK dan OM SPAN, 2019 (diolah)



Sumber: Simtrada DJPK dan OM SPAN, 2019 (diolah)

Diuraikan per jenis Dana Perimbangan, Dana Otsus dan Dana Insentif Daerah (DID), peningkatan terjadi pada persentase

penyaluran Dana Alokasi Umum, yang mana pada triwulan I tahun sebelumnya tersalurkan sebesar 32,56 persen, dan pada triwulan I tahun ini sudah tersalurkan sebesar 33,33 persen. Sedangkan penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus serta Dana Otsus dan DID yang mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



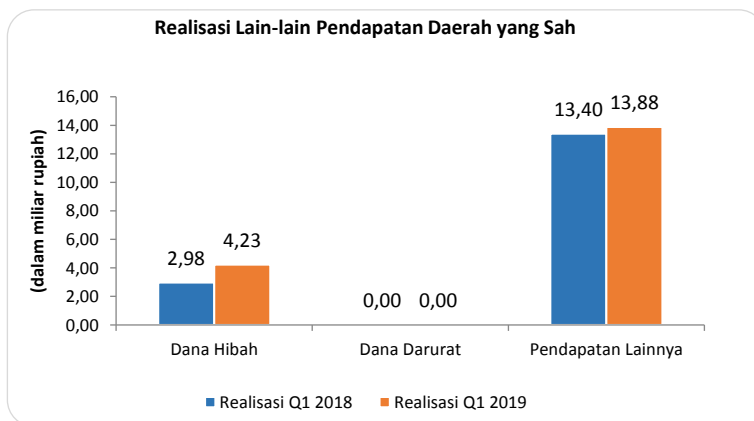
Sumber: OM SPAN, 2019 (diolah)

Untuk Dana Desa, total persentase realisasi sampai dengan triwulan I 2019 sebesar 18,01 persen dari total pagu penyaluran tahun 2019. sampai dengan triwulan I 2019 (31 maret 2019) terdapat 2 kabupaten yang belum realisasi dana desa yaitu Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Singkil.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sampai dengan triwulan I 2019 telah terealisasi sebesar Rp18,12 miliar, berkontribusi sebesar 0,26 persen terhadap total realisasi Pendapatan APBD Aceh triwulan I 2019. Namun realisasi tersebut lebih baik jika dibandingkan realisasi pada triwulan I 2018 yang sebesar Rp16,38 miliar.

Jika dirinci per jenis pendapatannya, kontribusi terbesar pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk realisasi triwulan I 2019 berasal dari pendapatan Lainnya dengan realisasi sebesar Rp13,88 miliar. Diikuti Pendapatan Hibah

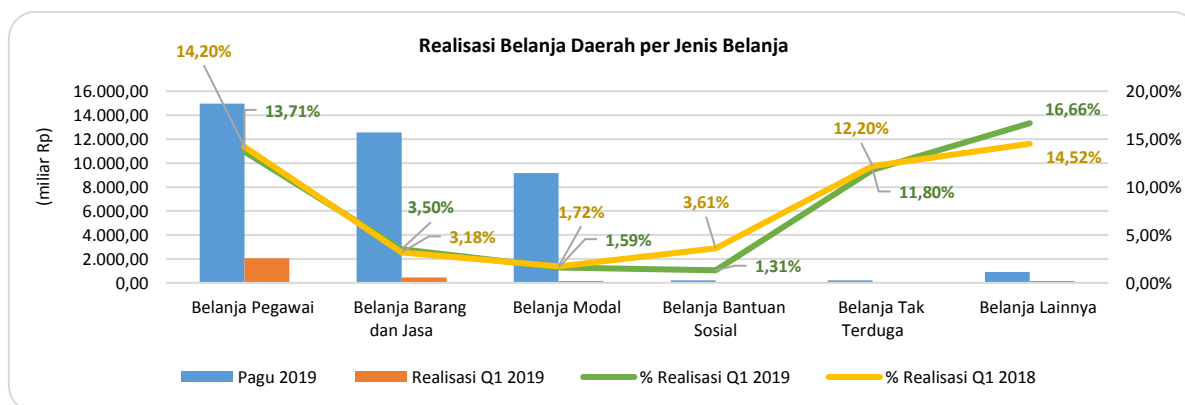


Sumber: BPKA, 2019 (diolah)

yang sebesar Rp4,23 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

## B. Belanja Daerah

### 1. Belanja dan Transfer APBD Berdasarkan Jenis Belanja

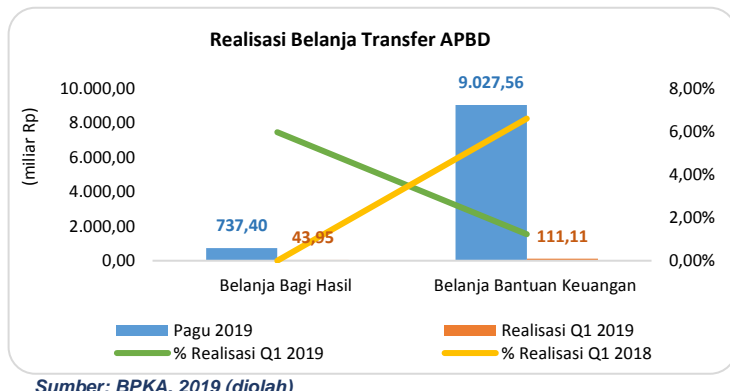


Sumber: BPKA, 2019 (diolah)

Dari seluruh jenis belanja dalam struktur belanja APBD di Provinsi Aceh, sampai dengan triwulan I 2019 persentase realisasi tertinggi berada pada Belanja Pegawai yaitu sebesar 14,20 persen, meningkat dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya (13,71 persen). Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, serta Belanja Bantuan Sosial terealisasi sangat rendah sampai dengan triwulan I 2019, dengan masing-masing sebesar 3,18 persen untuk Belanja Barang dan Jasa, 1,72 persen untuk Belanja Modal dan 3,61 persen untuk Belanja Bantuan Sosial. Persentase realisasi pada Belanja

Barang dan Jasa bahkan lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial sedikit lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah mengingat komponen yang paling rendah dalam hal realisasinya adalah Belanja Modal, jenis belanja yang diharapkan memiliki *multiplier effect* paling besar terhadap perekonomian.

Belanja Transfer Antar Daerah dan Desa terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Bagi Hasil, dengan masing-masing realisasi sampai dengan triwulan I 2019 sebesar Rp111,11 miliar dan Rp43,95 miliar. Secara

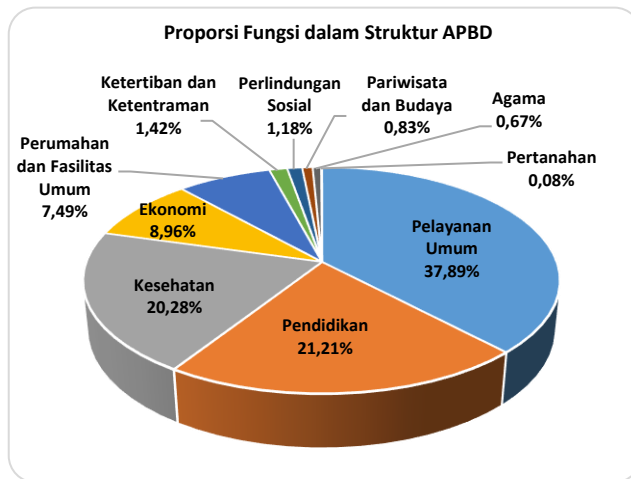


Sumber: BPKA, 2019 (diolah)

persentase realisasi, Belanja Bantuan Keuangan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sedangkan Belanja Bagi Hasil mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

## 2. Belanja APBD per Fungsi

Dalam struktur Belanja APBA (Pemerintah Provinsi Aceh), proporsi terbesar dalam realisasi belanja jika diuraikan per Fungsi berasal dari Fungsi Pelayanan Umum (37,89

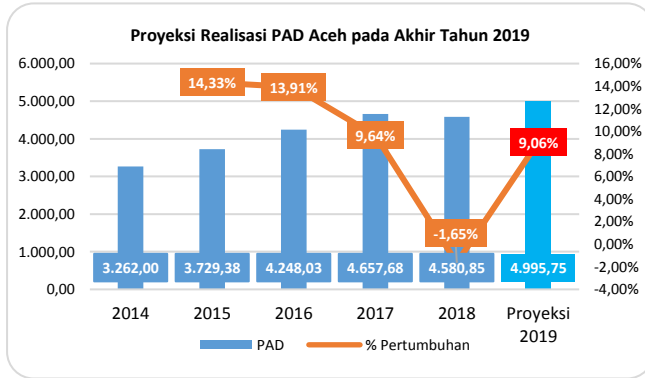


Sumber: BPKA, 2019 (diolah)

persen), diikuti posisi kedua yaitu Fungsi Pendidikan (21,21 persen), dan ketiga yaitu Fungsi Kesehatan (20,28 persen). Angka proporsi tersebut dihitung kurang produktif jika dilihat dari sudut pandang peningkatan perekonomian Aceh, dikarenakan kecilnya proporsi untuk Fungsi Ekonomi yang hanya sebesar 8,96 persen.

## C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Akhir Tahun 2019

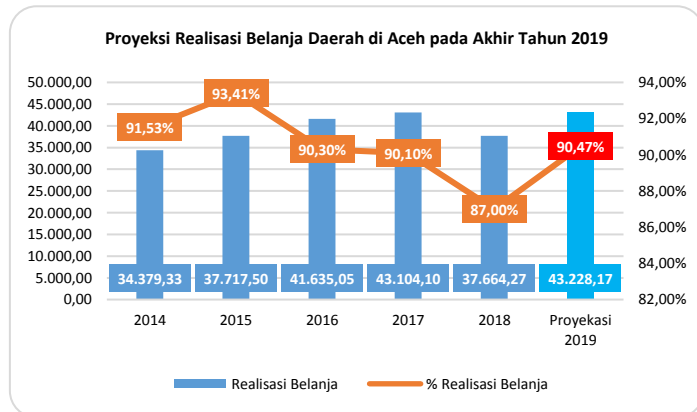
Untuk proyeksi realisasi PAD dilakukan dengan memperhitungkan pertumbuhan rata-rata penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan belanja pusat APBN dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi belanja pada periode 2014-2018 yang kemudian menjadi pengali pagu belanja APBN tahun 2019.



Sumber: BPKA, 2019 (diolah)

mencapai ± Rp4,99 triliun, atau dengan kenaikan yang diprediksi sebesar ±9,06 persen dari realisasi PAD tahun 2018.

Proyeksi realisasi belanja APBD dihitung berdasarkan rata-rata persentase realisasi belanja dalam 5 tahun terakhir. Dalam perhitungannya, rata-rata persentase realisasi belanja daerah dalam 5 tahun terakhir yaitu 90,47 persen. Rata-rata



Sumber: BPKA, 2019 (diolah)

persentase realisasi tersebut selanjutnya menjadi pengali dari pagu belanja daerah tahun 2019, sehingga belanja pusat pada akhir tahun 2019 diproyeksikan akan terealisasi kurang lebih sebesar 90,47 persen, dengan nominal realisasi sebesar ± Rp43,23 triliun.

#### IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

##### Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Aceh

Uraian	Q1 2019			Realisasi Konsolidasi Q1 2018	% Kenaikan/ Penurunan
	Pusat	Daerah	Konsolidasi		
<b>Pendapatan Negara</b>	<b>890,19</b>	<b>7.042,59</b>	<b>7.932,78</b>	<b>7.455,98</b>	<b>6,39%</b>
Pendapatan Pajak	687,80	286,62	974,41	961,53	1,34%
Pendapatan Bukan Pajak	202,39	198,33	400,71	466,51	-14,10%
Hibah	0,00	0,00	0,00	2,98	-100,00%
Transfer	0,00	6.539,54	6.539,54	6.024,96	8,54%
Pendapatan Lainnya	0,00	18,12	18,12	0,00	0%
<b>Belanja Negara</b>	<b>2.206,18</b>	<b>2.969,99</b>	<b>5.176,17</b>	<b>5.442,73</b>	<b>-4,90%</b>
Belanja Pegawai	1.190,44	2.050,00	3.240,44	3.394,49	-4,54%
Belanja Barang dan Jasa	721,87	439,33	1.161,20	1.003,21	15,75%
Belanja Modal	293,10	145,32	438,42	433,90	1,04%
Belanja Bantuan Sosial	0,77	2,88	3,65	28,35	-87,11%

Belanja Tak Terduga	0,00	24,83	24,83	17,61	40,99%
Belanja Transfer	0,00	155,06	155,06	362,78	-57,26%
Belanja Lainnya	0,00	152,58	152,58	202,39	-24,61%
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>-1.315,99</b>	<b>4.072,60</b>	<b>2.756,61</b>	<b>2.013,25</b>	<b>36,92%</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>397,65</b>	<b>397,65</b>	<b>548,99</b>	<b>-27,57%</b>
Penerimaan Pembiayaan	0,00	403,07	403,07	550,79	-26,82%
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	5,43	5,43	1,80	201,44%
<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran</b>	<b>-1.315,99</b>	<b>4.470,25</b>	<b>3.154,26</b>	<b>2.562,24</b>	<b>23,11%</b>

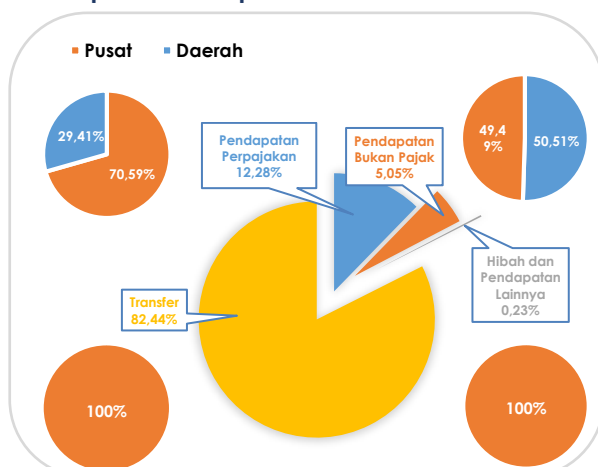
Sumber: OM SPAN, Simtrada DJPK dan BPKA, 2019

Jika digabungkan antara LRA APBN dan LRA APBD periode triwulan I 2019 di lingkup Provinsi Aceh dan kemudian dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018, terdapat kenaikan sebesar 6,39 persen pada realisasi pendapatan pada tahun ini, dan terjadi penurunan sebesar 4,90 persen pada realisasi belanja. Kenaikan pada realisasi pendapatan disebabkan terjadinya kenaikan pada hampir semua jenis pendapatan kecuali Pendapatan Bukan Pajak dan Hibah. Sedangkan penurunan pada realisasi belanja juga terjadi pada hampir semua jenis belanja kecuali Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

## A. Pendapatan Konsolidasian

### 1. Analisis Perbandingan Proporsi dan Perubahan Pendapatan Konsolidasian

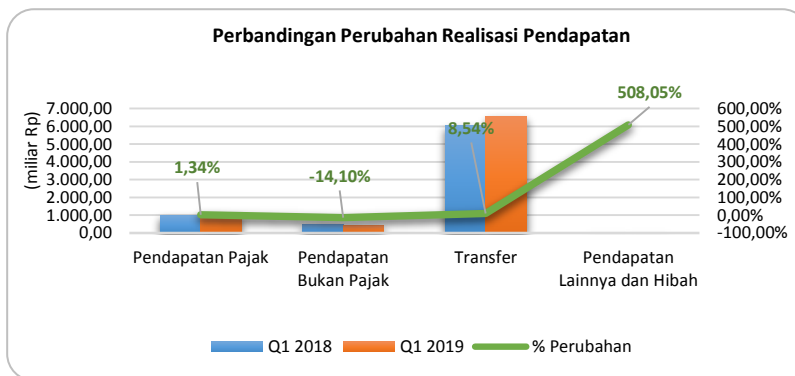
Komposisi Pendapatan Konsolidasian Q1 2019



Sumber: OM SPAN, Simtrada DJPK dan BPKA, 2019

Di antara semua jenis pendapatan negara konsolidasian, realisasi pendapatan transfer pada triwulan I 2019 memiliki proporsi paling besar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang lain, yaitu sebesar 82,98 persen dari seluruh realisasi pendapatan. Angka tersebut cukup jauh jika dibandingkan dengan proporsi untuk Pendapatan Pajak yang hanya sebesar 12,28 persen dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebesar 5,05 persen dari total realisasi pendapatan. Hal ini menandakan bahwa sumber pendapatan yang ada di Aceh saat ini masih belum mampu untuk menutup kebutuhan pendanaan di Aceh, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi.

Secara persentase perubahannya, kenaikan pada Pendapatan Lainnya dan Hibah merupakan yang paling signifikan (508,05 persen). Jika diurakan, kenaikan tersebut disebabkan



adanya peningkatan yang sangat signifikan pada komponen pendapatan APBD di pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## 2. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

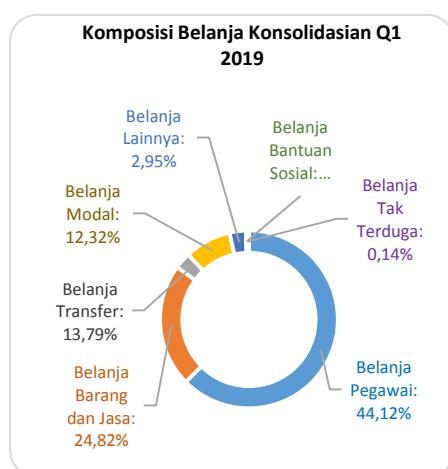
Uraian	Q1 2018	Q1 2019
Penerimaan Pajak (Pusat+Daerah)	961,53	974,41
PDRB Aceh s.d Triwulan I (ADHB)	37.130,00	38.840,00
Rasio Pajak (%)	2,59%	2,51%

Sumber: OM SPAN, BPS Aceh dan BPKA, 2019 (diolah)

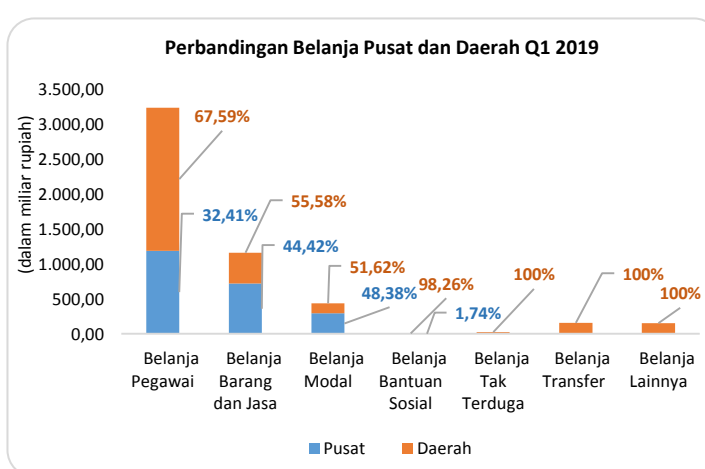
Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDRB Aceh sampai dengan triwulan I 2019 turun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Data tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyempurnaan sistem administrasi perpajakan serta pengawasan yang lebih intensif pada sektor usaha tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan diharapkan mampu dilakukan pemerintah untuk lebih meningkatkan realisasi pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

### B. Belanja Konsolidasian

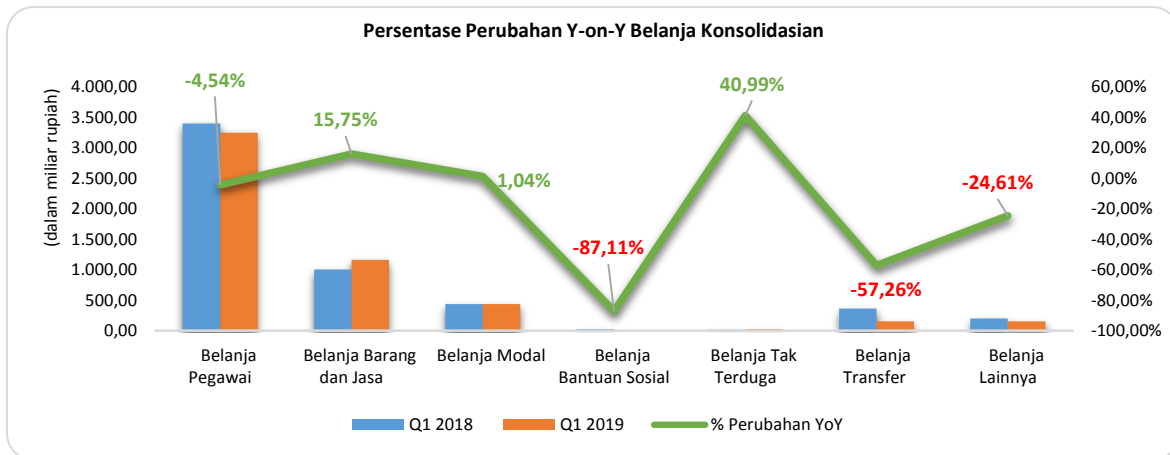
#### 1. Analisis Perbandingan Proporsi dan Perubahan Belanja Konsolidasian



Sumber: OM SPAN dan BPKA, 2019 (diolah)



Sumber: OM SPAN dan BPKA, 2019 (diolah)



Sumber: OM SPAN dan BPKA, 2019 (diolah)

Belanja Pegawai masih merupakan kontributor terbesar dalam struktur belanja negara, dengan proporsi sebesar 62,60 persen dari total realisasi belanja konsolidasian sampai dengan triwulan I 2019. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada triwulan I 2018, terjadi penurunan realisasi pada tiga jenis belanja, antara lain Belanja Bantuan Sosial (-87,11 persen), Belanja Transfer (-57,26%) dan Belanja Lainnya (-24,61 persen). Secara khusus, penurunan pada Belanja Transfer sangat disayangkan mengingat jenis belanja tersebut merupakan stimulus fiskal utama dalam pembangunan yang efek multiplier nya sangat dibutuhkan dalam mengangkat perekonomian.

## 2. Analisis Kontribusi Belanja Pemerintah dalam PDRB Aceh

Uraian	Q1 2018	Q1 2019
Realisasi Belanja Pemerintah (non transfer)	5.080,55	5.021,12
PDRB Aceh s.d Triwulan I 2019 (ADHB)	37.130,00	38.840,00
Rasio Belanja Pemerintah Terhadap PDRB	13,68%	12,93%

Sumber: OM SPAN, BPS dan BPKA, 2019

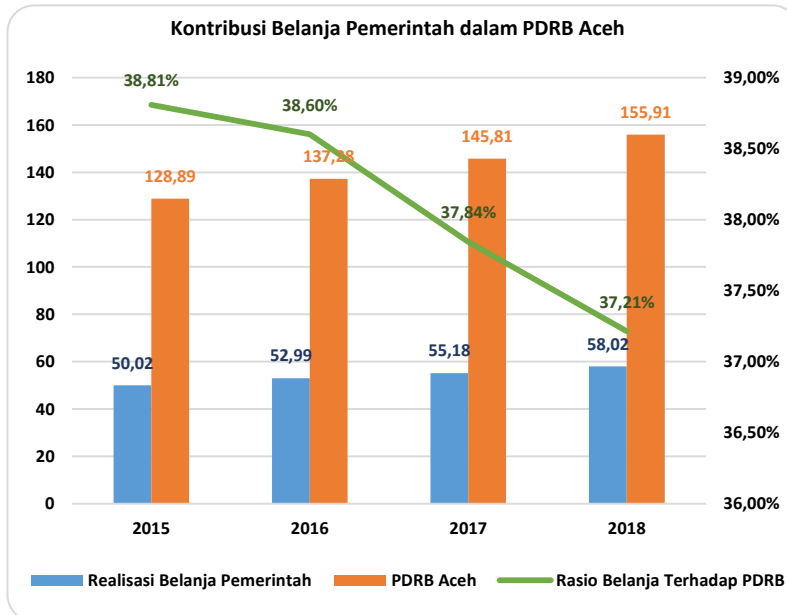
Sampai dengan Triwulan I 2019, rasio belanja pemerintah terhadap PDRB Aceh sebesar 12,93 persen, menurun jika dibandingkan dengan rasio pada triwulan I 2018 yang sebesar 13,68 persen. Sementara PDRB Aceh sampai dengan triwulan I 2019 justru mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat faktor lain yang lebih mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi Aceh. Berdasarkan data BPS Aceh, terdapat dua jenis pengeluaran yang memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan belanja pemerintah, yaitu Pengeluaran Rumah Tangga dan PMTB.

## C. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional

Secara konseptual dalam teori ekonomi makro, keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dapat dilihat dalam persamaan  $Y = C + I + G + (X - M)$ , dimana  $Y$ =pendapatan nasional,  $C$ =konsumsi masyarakat,  $I$ =investasi,  $G$ =pengeluaran pemerintah,  $X$ =ekspor, dan  $M$ =impor. Dari persamaan tersebut dapat dilihat bahwa besaran pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh terhadap besaran pendapatan nasional/daerah (PDB/PDRB). Artinya semakin besar pengeluaran pemerintah ( $G$ )



semakin besar pula pendapatan nasional/daerah. Peningkatan  $Y$  merupakan pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain penyerapan anggaran pemerintah akan membantu pertumbuhan ekonomi.



terhadap PDRB Aceh sebesar 37,21 persen. Angka tersebut menurun jika dibandingkan dengan rasio pada tahun 2017 yang sebesar 37,84 persen. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir, baik realisasi belanja pemerintah maupun PDRB sama-sama mengalami tren kenaikan. Dalam hal ini dapat diambil suatu hipotesis bahwa belanja pemerintah merupakan salah satu variabel penting yang kemungkinan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Konsumsi pemerintah menjadi salah satu kontributor yang cukup krusial dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Grafik disamping menunjukkan perkembangan rasio realisasi belanja pemerintah (pusat dan daerah) di Aceh terhadap perkembangan PDRB Aceh. Pada tahun 2018, rasio belanja pemerintah

## V. BERITA / ISU FISKAL TERPILIH

### A. Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Tantangan Kapasitas Fiskal Provinsi Aceh

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama Aceh. Hal ini terlihat jelas di dalam komposisi prioritas pembangunan Aceh yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Aceh periode 2018 – 2022. Rata-rata proporsi belanja infrastruktur menjadi yang tertinggi yaitu mencapai 31.83%, dan diikuti pendidikan (21.79%) dan kesehatan (18.41%).

#### Distribusi Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan di Aceh (2018 – 2022)

No	Prioritas Pembangunan Aceh	% Proporsi					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1.47	1.55	1.59	1.68	1.82	1.62
2	Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam	3.40	4.94	5.28	5.51	6.21	5.07
3	Keberlanjutan Perdamaian	0.71	0.66	0.68	0.68	0.74	0.69
4	Membangun SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	15.91	22.15	22.19	22.99	25.68	21.79
5	Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	19.88	18.04	17.98	17.39	18.76	18.41
6	Kedaulatan dan Ketahanan Pangan	13.18	15.31	15.45	15.16	16.85	15.19
7	Penyediaan Sumber Energi Listrik	1.00	0.50	0.50	0.49	0.54	0.60
8	Mengembangkan Sentra-Sentra Produksi dan Industri Kreatif yang Kompetitif	3.48	3.75	3.94	3.73	4.28	3.84
9	Revitalisasi Fungsi Perencanaan Daerah	0.92	0.94	0.98	0.98	0.98	0.96
10	Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan	40.05	32.15	31.41	31.39	24.14	31.83

Sumber: RPJMD Provinsi Aceh 2018-2022 (diolah)

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang penting bagi suatu daerah. Selain mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan menciptakan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkelanjutan akan membawa dampak positif lain seperti peningkatan daya saing suatu daerah/negara.

Namun, tingginya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur suatu daerah dan terbatasnya anggaran daerah di sisi lain, menjadi tantangan bagi suatu daerah. Di Provinsi Aceh, ruang gerak pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan sangat kentara. Hal ini diindikasikan dengan struktur APBD Provinsi Aceh yang sebagian besar dananya ditentukan dan ditopang oleh dana dari pusat. Selain itu, Dana Otonomi Khusus Aceh sebagai salah satu suntikan fiskal bagi Provinsi Aceh yang akan segera berakhir di Tahun 2028 perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Aceh.

Untuk itu, diperlukan terobosan baru dalam mengatasi tantangan pembangunan, khususnya terkait dengan pendanaan. Salah satu skema pendanaan infrastruktur yang dapat diambil sebagai salah satu solusi alternatif adalah melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). KPBU adalah Kerja sama antara pemerintah

dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Sistem ini bertujuan untuk: a) mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta; b) mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; c) menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat; d) mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau; e) memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

Berdasarkan data DJPPR (Kementerian Keuangan) per Januari 2019 pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema KPBU baru mencapai 26 proyek. Satu proyek diantaranya adalah pembangunan RSUD di Banda Aceh. Angka tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan skema KPBU belum sepenuhnya digunakan bagi Pemerintah Daerah yang memiliki keterbatasan ruang fiskal. Padahal, dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan menyampaikan agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada APBN/APBD saja, tetapi juga memanfaatkan skema ini sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemda. Bagi Pemerintah Aceh, skema KPBU tentu saja dapat digunakan sebagai alternatif untuk mendukung tercapainya RPJMD yang sudah dicanangkan.

## B. Pembangunan RSUD di Aceh melalui skema KPBU sebagai Alternatif Keterbatasan Fiskal

### Plt Gubernur: RSUD Proyek KPBU Pertama di Aceh

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengapresiasi Kementerian Keuangan RI yang telah berkomitmen membangun Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin, dengan program Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Pembangunan RSUD merupakan proyek pertama di Aceh yang menggunakan program KPBU.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada awak media, usai menandatangani perjanjian pelaksanaan fasilitas dan pendampingan transaksi pada proyek KPBU pembangunan RSUD dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, pada Rapat Peningkatan Kemandirian Fiskal Aceh, di Ruang Serbaguna Setda Aceh, Selasa (8/1/2019).

“Kita mulai dari RSUD untuk pembiayaan melalui sistem KPBU karena kesehatan adalah visi misi utama Pemerintah Aceh 2017-2022. Untuk itu, kami berterima kasih kepada Kementerian Keuangan. Selain yang pertama untuk Aceh, pembangunan RSUD ini juga menggunakan sistem Syari’ah, inovasi ini adalah yang pertama bagi Kemenkeu dan Pemerintah Aceh,” ungkap Nova.

Untuk diketahui bersama, dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah terus mendorong program KPBU atau yang juga dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) untuk penyediaan infrastruktur di daerah.

Skema KPBU merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015, tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU untuk penyediaan Infrastruktur. Kerjasama seperti ini sangat bermanfaat dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik.

Dalam kerjasama ini, pihak swasta diperbolehkan berinvestasi untuk membiayai fasilitas yang ingin ditingkatkan, di mana sampai periode tertentu mereka bisa mendapat untung dari penggunaan infrastruktur tersebut. Setelah kerjasama berakhir, infrastruktur itu menjadi milik lembaga daerah.

Luky Al Firman, selaku Dirjen Pegelolaan, Pembiayaan dan Resiko Kemenkeu menjelaskan, pelibatan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat dari sisi penyediaan pendanaan, tapi juga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pelaksanaan proyek yang baik, efektif dan efisien.

“Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan skema KPBU bagi pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing. Skema KPBU ini akan mendorong pembangunan di daerah, sehingga pembangunan tidak hanya bergantung dari APBN maupun APBD.

Senada dengan Luky, Nova Iriansyah juga memaparkan, selama ini Pemerintah Aceh sedang membuka ruang seluas-luasnya bagi kemandirian fiskal.

“Jika hanya bergantung dengan skema APBD, maka tidak akan terjadi percepatan pembangunan, dan kemandirian akan menjadi fatamorgana semata. Kalau kita hanya terpaku dengan stimulan anggaran yang normatif, maka mengelola dan memelihara infrastruktur yang ada saja akan sulit,” imbuh Plt Gubernur.

Pembangunan, sambung Nova, harus didukung oleh skema pendanaan yang terkonsolidasi karena hanya dengan inovasi ini maka pembangunan yang baik akan tercapai. Oleh karena itu, Plt Gubernur menginstruksikan seluruh pemangku kebijakan terkait pada pembangunan RSUD, untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.

“Timeline 2 tahun hingga peresmian peletakan batu pertama yang ditargetkan Kemenkeu harus kita apresiasi dengan bekerja semaksimal mungkin. Ini sangat cepat karena di sistem pembiayaan konvensional biasanya juga tidak secepat itu. Untuk itu, kami mohon do’a dan dukungan dari masyarakat Aceh agar niat baik ini bisa terselenggara dengan baik dan tepat waktu,” pungkaskan Plt Gubernur Aceh.

RSUD akan menjadi yang pertama sebuah proyek yang dibangun dengan menggunakan skema KPBU di Aceh. Proyek pembangunannya akan menelan biaya sebesar Rp2,6 triliun ini bertujuan untuk melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.

Nantinya, proyek yang akan dibangun di atas lahan RSUD lama itu akan dilengkapi dengan fasilitas kesehatan di antaranya Pusat Traumatologi, Pusat Radio Onkologi, Pusat Ginjal, Pusat Otak Terpadu, dan Pusat Jantung Terpadu. [adv]

By Redaksi - Jan 9, 2019

<http://www.acehkita.com/plt-gubernur-rsuz-proyek-kpbu-pertama-di-aceh/>



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh  
Komplek Gedung Keuangan Negara, Gedung A Lantai II-III  
Jl. Teungku Chik Ditiro  
Telepon (0651) 22462, Faksimile (0651) 22432  
Banda Aceh 2341

**KANWIL DITJEN  
PERBENDAHARAAN**  
*Provinsi Aceh*



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH, GEDUNG A LANTAI 2-3  
JALAN TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH 23241  
TELEPON (0651) 31070 FAKSIMILE 31094 SITUS [www.djpbn-aceh.org](http://www.djpbn-aceh.org)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : ND-477 /WPB.01/2019

Yth. : Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran  
Dari : Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh  
Sifat : Segera  
Hal : Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2019 Kanwil Ditjen  
Perbendaharaan Prov. Aceh  
Tanggal : 10 Mei 2019

---

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini disampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2019 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh. *Softcopy* laporan dimaksud telah dikirimkan ke alamat *email* [ditpa@kemenkeu.go.id](mailto:ditpa@kemenkeu.go.id) dan ditembuskan ke [lo.ditpa@gmail.com](mailto:lo.ditpa@gmail.com).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Zaid Burhan Ibrahim